

ANALISIS KEBUTUHAN PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN SEKOLAH DASAR (SD) DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2020

A NEEDS ANALYSIS OF THE KINDERGARTEN (TK) AND PRIMARY SCHOOLS (SD)' SUPERVISORS IN THE SLEMAN DISTRICT'S YOUTH AND SPORTS EDUCATION DEPARTMENT YEAR 2016-2020

Oleh: Gerry Nugroho, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, gerryn72@gmail.com

Abstrak

Penelitian proyeksi pengawas TK/SD berdasarkan sekolah dan guru tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman. (1) Rasio pengawas berdasarkan sekolah TK/SD tahun 2010 adalah 1 : 20, 2011 adalah 1 : 21, 2012 adalah 1 : 22, 2013 adalah 1 : 24, 2014 adalah 1 : 26, dan 2015 adalah 1 : 32. (2) Rasio pengawas berdasarkan guru TK/SD tahun 2010 adalah 1 : 167, 2011 adalah 1 : 178, 2012 adalah 1 : 182, 2013 adalah 1 : 188, 2014 adalah 1 : 199, dan 2015 adalah 1 : 242. (3) Proyeksi kebutuhan pengawas menggunakan perbandingan proyeksi jumlah sekolah TK/SD, yaitu kebutuhan ideal tahun 2016 adalah 101, 2017 adalah 101, 2018 adalah 101, 2019 adalah 102, dan 2020 adalah 103. (4) Proyeksi kebutuhan pengawas menggunakan perbandingan proyeksi jumlah guru TK/SD, yaitu kebutuhan ideal tahun 2016 adalah 125, 2017 adalah 122, 2018 adalah 121, 2019 adalah 119, dan 2020 adalah 116.

Kata kunci: proyeksi pengawas, pengawas TK/SD, kebutuhan pengawas.

Abstract

This study aims to describe the projected needs of kindergarten and elementary schools' supervisors based on the number of schools and teachers year 2016-2020 in Sleman Regency. The result of the study is showed as follows. (1) the ratio of supervisors of kindergarten or elementary school based on the number of the kindergarten/elementary school in 2010 was 1:20, in 2011 was 1:21, in 2012 was 1:22, in 2013 was 1:24, in 2014 was 1:26, and in 2015 was 1:32. (2) the ratio of the supervisors of kindergarten/elementary school based on the number of the teachers of kindergarten/elementary school in 2010 was 1:167, in 2011 was 1:178, in 2012 was 1:182, in 2013 was 1:188, in 2014 was 1:199, and in 2015 was 1:242. (3) Projection needs of supervisors of kindergarten/elementary school based on the supervisors' retirement age uses the ratio of the projection of the number of kindergarten/elementary schools; that is the ideal number in 2016 is 101, in 2017 is 101, in 2018 is 101, in 2019 is 102, and in 2020 is 103. (4) The needs projection of kindergarten/elementary schools' supervisors based on the retirement age of the supervisor uses the ratio of the projection of the number of the teacher; that is the ideal number in 2016 is 125, in 2017 is 122, in 2018 is 121, in 2019 is 119, and in 2020 is 116.

Keywords: projection supervisor, kindergarten/elementary schools' supervisor, the number of the supervisors needed.

PENDAHULUAN

Pengawas sekolah/satuan pendidikan memiliki tugas pokok yakni melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru

dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud tersebut merupakan kegiatan pengawasaan akademik dan pengawasan manajerial. Untuk itu pengawas sekolah dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai agar fungsi pengawasan dan pembinaan berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan Sahertian (2000:19) bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder

pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Menurut PP No 12 Tahun 2007 dalam pengangkatan jabatan pengawas harus melihat dari kualifikasi pendidikan dan riwayat pengalaman kerja sebagai pengajar atau kepala sekolah pada satuan pendidikan, di Dinas Dikpora Kabupaten Sleman pengangkatan pengawas TK/RA dan SD/MI tidak sesuai dengan PP No 12 Tahun 2007, yang melakukan pengangkatan pengawas dengan menggabungkan fungsi kepengawasan TK/RA dan SD/MI. Seharusnya pengawasan di lembaga pendidikan TK/RA dan SD tidak boleh digabungkan, karena kualifikasi pendidikan pengawas sekolah mempengaruhi dalam proses penilaian dan pembinaan, pengawas sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan jenis sekolah dan guru yang dibina akan menghasilkan supervisi pendidikan yang optimal. Selain itu berdasarkan SK Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sleman Nomor: 307/KPTS/2012, dapat diketahui rasio perbandingan satu pengawas dengan jumlah sekolah dan guru yang dibina di Kabupaten Sleman juga tidak seimbang yakni 1 pengawas membina paling sedikit 19 sekolah, sedangkan menurut Permen No 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/madrasah ibtidiyah (SD/MI) paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru.

Untuk itu penting merumuskan sebuah analisis kebutuhan pengawas jenjang TK/SD di Kabupaten Sleman. Analisis ini akan memproyeksikan bagaimana seharusnya rasio persebaran pengawas di tiap kecamatan dan ketersediaan pengawas pada 5 tahun kedepan 2016-2020 dengan banyaknya pendidikan TK/SD di Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, mengikuti Suharsimi Arikunto (2006: 83), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya menyajikan dan menganalisis data agar data tersebut bermakna dan komunikatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Februari-Maret 2015 di Kabupaten Sleman dengan pengumpulan data di Dinas Dikpora Kabupaten Sleman.

Target/Subjek Penelitian

Analisis kebutuhan pengawas TK/SD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memproyeksikan ketersediaan pengawas TK/SD di Dinas Dikpora Kabupaten Sleman dari segi kuantitas atau banyaknya pengawas TK/SD yang disesuaikan dengan jumlah sekolah TK/SD atau guru TK/SD selama lima tahun ke depan tahun 2016-2020, rasio ideal yang digunakan mengacu pada Permen No. 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya.

Prosedur

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen berupa data sekolah TK/SD, guru TK/SD, dan pengawas TK/SD yang ada di Disdikpora Kabupaten Sleman.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 221) teknik dokumentasi yang disebut sebagai studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai teknik

pengumpulan data sekunder. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif.

Pedoman dokumentasi digunakan untuk membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, kisi-kisi pedoman dokumentasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Data jumlah sekolah TK/RA di Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2015.
2. Data jumlah guru TK/RA di Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2015.
3. Data jumlah sekolah SD/MI di Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2015.
4. Data jumlah guru SD/MI di Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2015.
5. Data jumlah pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2015.

Teknik Analisis Data

Analisis data sekunder menurut Nanang Martono (2011: 113) yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah ada ataupun yang sudah matang yang dapat diperoleh pada instansi atau lembaga tertentu. Yang membedakan penelitian dengan analisis data sekunder dengan jenis lainnya adalah terkait sumber data dan pengolahannya. Jadi pada penelitian jenis analisis data sekunder peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan melainkan menggunakan data yang telah dikumpulkan serta diolah oleh instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan analisis data sekunder dengan metode proyeksi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) dalam buku Teknik Proyeksi Pendidikan (Pusat Statistik Pendidikan; 2007: 13), proyeksi adalah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada sekarang. Teknik atau metode proyeksi merupakan salah satu model perencanaan pendidikan yang sering digunakan di tingkat mikro (satuan lembaga pendidikan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proyeksi, penelitian ini bertujuan meramalkan tentang keadaan masa yang akan datang berdasarkan pada keadaan serta data yang

ada pada masa sekarang. Teknik proyeksi dalam penelitian ini menggunakan metode angka pertumbuhan (AP), sebagai berikut :

$$AP = \frac{Dn - (Dn - 1)}{Dn - 1} \times 100 \%$$

AP : Angka Pertumbuhan

Dn : Data Tahun n

Dn - 1 : Data Tahun n - 1

Hasil perhitungan angka pertumbuhan (AP) dijadikan acuan untuk proyeksi sekolah TK/SD dan guru TK/SD, rumus yang digunakan untuk proyeksi sebagai berikut :

$$\text{Proyeksi} = \text{Data tahun } n \times \left(1 + \left(\frac{\text{Angka pertumbuhan tahun } n}{100} \right) \right)$$

Analisis data proyeksi merupakan penelitian yang didasarkan pada asumsi data dasar yaitu data yang ada masa sekarang yang dipergunakan untuk memperkirakan kondisi masa yang akan datang. Data dasar yang diambil peneliti dalam penelitian proyeksi kebutuhan pengawas TK/RA dan SD/MI ini adalah data sekolah dan guru TK/RA dan SD/MI dibandingkan pengawas di lima tahun terakhir yaitu tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 untuk memproyeksikan kondisi yang akan terjadi di 5 tahun ke depan yaitu tahun 2016-2020.

Untruk menghitung jumlah pengawas TK/RA dan SD/MI yang dibutuhkan, maka sesuai dengan Permen tahun 2010 tentang tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sekolah

$$\text{Pengawas} = \frac{\text{Jumlah Sekolah Tahun-}_n}{10}$$

2. Berdasarkan Guru

$$\text{Pengawas} = \frac{\text{Jumlah Guru Tahun-}_n}{60}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuatan suatu proyeksi pada umumnya berlandaskan pada sejumlah asumsi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun asumsi yang digunakan dalam proyeksi ini adalah menggunakan asumsi tanpa kebijakan. Sebagaimana dijelaskan Pusat Statistik Pendidikan (2007: 17) bahwa terdapat tiga asumsi yang salah satunya adalah tanpa kebijakan yaitu menggunakan kecenderungan data beberapa tahun terakhir dan konstan berdasarkan data tahun terakhir. Dalam membuat proyeksi pengawas TK/SD maka perlu adanya proyeksi sekolah TK/SD dan guru TK/SD.

Dalam membuat proyeksi sekolah dan guru TK/SD dalam penelitian ini menggunakan metode angka pertumbuhan (AP). Angka pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai dasar asumsi pertumbuhan jumlah sekolah TK/SD dan guru TK/SD pada lima tahun yang akan datang yakni tahun 2016-2020. Untuk membuat proyeksi pengawas TK/SD selama lima tahun kedepan digunakan asumsi usia pensiun jabatan fungsional pengawas, yakni berdasarkan Permen No. 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya menyatakan bahwa batas usia pensiun pengawas adalah 60 tahun. Dari data tahun 2010-2015 dan perhitungan proyeksi tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat digambarkan secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Sekolah TK/SD, Guru TK/SD, dan Pengawas TK/SD Kabupaten Sleman Tahun 2010-2020

Tahun	TK/SD		SD/MI		Pengawas TK/SD
	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	
2010	484	2074	499	6120	49
2011	486	2107	501	6068	46
2012	489	2069	499	5937	44
2013	492	2088	501	5821	42
2014	497	2074	504	5692	39
2015	500	2133	504	5365	31
2016	503	2173	506	5320	27
2017	503	2139	504	5206	24
2018	508	2161	506	5104	22

Tahun	TK/SD		SD/MI		Pengawas TK/SD
	Sekolah	Guru	Sekolah	Guru	
2019	512	2159	509	4993	17
2020	516	2220	509	4717	11

Perhitungan yang didapat dari pembahasan data sebelumnya menunjukkan bahwa kecenderungan data untuk sekolah TK/RA rata-rata mengalami trend positif, yakni pertumbuhan sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kecamatan yang mengalami peningkatan untuk sekolah TK/RA adalah Kecamatan Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Tempel, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Berbah. Kecamatan yang stabil atau tidak mengalami peningkatan dan pengurangan jumlah sekolah TK/RA adalah Kecamatan Sleman, Kecamatan Minggir, Kecamatan Turi, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Depok. Untuk kecamatan yang sekolah TK/RA mengalami trend pertumbuhan negatif adalah Kecamatan Prambanan. Populasi sekolah TK/RA terbanyak ada di Kecamatan Depok dengan 62 sekolah TK/RA, dan populasi paling sedikit dimiliki Kecamatan Turi dengan 17 sekolah TK/RA. Kecenderungan data sekolah SD/MI di Kabupaten Sleman fluktuatif, akan tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah sekolah SD/MI adalah Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Berbah. Kecamatan yang stabil atau tidak mengalami peningkatan dan pengurangan jumlah sekolah SD/MI adalah Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati, Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Turi, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Prambanan. Untuk kecamatan yang sekolah SD/MI mengalami trend pertumbuhan negatif adalah Kecamatan Tempel dan Kecamatan Cangkringan. Populasi sekolah SD/MI terbanyak ada di Kecamatan Depok dengan 50 sekolah SD/MI, dan

populasi paling sedikit dimiliki Kecamatan Cangkringan dengan 20 sekolah SD/MI.

Data guru TK/RA di Kabupaten Sleman dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhannya fluktuatif, semua kecamatan relatif mengalami pengurangan guru TK/RA kecuali Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ngemplak yang mengalami trend pertumbuhan guru TK/RA positif. Populasi guru TK/RA terbanyak ada di Kecamatan Depok yang juga memiliki sekolah TK/RA terbanyak, dan kecamatan yang memiliki guru TK/RA paling sedikit adalah Kecamatan Moyudan. Data guru SD/MI di Kabupaten Sleman dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa trend pertumbuhannya negatif, semua kecamatan mengalami trend pertumbuhan guru SD/MI negatif menurut Disdikpora Kabupaten Sleman dikarenakan banyaknya jumlah guru SD/MI yang pensiun. Pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan jumlah pengawas, hal ini disebabkan karena tidak ada proses rekrutmen dari Disdikpora Kabupaten Sleman.

Mengacu pada Permen 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa pengawas sekolah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar paling sedikit membina 10 satuan pendidikan, untuk itu hasil dari perhitungan yang telah dibuat adalah sebagai berikut, Diketahui bahwa tahun 2016 kebutuhan ideal akan pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman sebesar 101 pengawas, akan tetapi kondisi pengawas yang ada pada tahun tersebut hanya ada 27 pengawas TK/SD sehingga masih kurang 74 pengawas TK/SD. Tahun 2016 kekurangan paling banyak dialami oleh Kecamatan Depok, yakni kebutuhan ideal 11 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 2 pengawas TK/SD masih kurang 9 pengawas TK/SD. Sedangkan kekurangan paling kecil ada di Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir dengan kebutuhan Ideal 4 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 2 pengawass TK/SD masih kurang 2 pengawas TK/SD. Tahun 2017 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten

Sleman masih sama yakni 101 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 24 pengawas TK/SD dan kekurangan 77 pengawas TK/SD. Kebutuhan pengawas di tahun 2017 meningkat disebabkan oleh adanya 3 pengawas yang mengalami pensiun yakni 2 pengawas Kecamatan Minggir dan 1 pengawas Kecamatan Kalasan. Kecamatan Minggir di Tahun 2017 mengalami kekosongan pengawas TK/SD karena usia pensiun pengawas, sehingga kebutuhannya adalah 4 pengawas TK/SD.

Tahun 2018 kondisi ketersediaan pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman kembali berkurang jadi 22 pengawas TK/SD dikarenakan Kecamatan Seyegan mengalami pensiun 1 pengawas TK/SD dan Kecamatan Tempel juga mengalami pensiun 1 pengawas TK/SD, Kecamatan Tempel pada tahun 2018 mengalami kekosongan pengawas TK/SD. Tahun 2018 Kabupaten Sleman mengalami kekurangan 79 pengawas TK/SD. Pada tahun 2019 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman meningkat jadi 102 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 17 pengawas TK/SD dan kekurangan 85 pengawas TK/SD. Kecamatan Cangkringan pada tahun 2019 mengalami kekosongan pengawas TK/SD, jadi kebutuhan pengawas TK/SD Kecamatan Cangkringan pada tahun ini adalah 4 pengawas TK/SD. Tahun 2020 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman meningkat jadi 103 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 11 pengawas TK/SD dan kekurangan 92 pengawas TK/SD. Tahun 2020 ada tiga kecamatan yang mengalami kekosongan pengawas TK/SD yakni Kecamatan Mlati, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem.

Mengacu pada Permen 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa pengawas sekolah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar paling sedikit membina 60 guru, untuk itu hasil dari perhitungan yang telah dibuat adalah sebagai berikut, Diketahui bahwa tahun 2016 kebutuhan ideal akan pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman sebesar 125 pengawas, akan tetapi kondisi pengawas yang ada pada tahun tersebut 27 pengawas TK/SD sehingga masih

kurang 98 pengawas TK/SD. Tahun 2016 kekurangan paling banyak dialami oleh Kecamatan Depok, yakni kebutuhan ideal 17 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 2 pengawas TK/SD masih kurang 15 pengawas TK/SD. Sedangkan kekurangan paling kecil ada di Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir dengan kebutuhan Ideal 4 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 2 pengawas TK/SD masih kurang 2 pengawas TK/SD. Tahun 2017 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman mengalami penurunan jadi 122 pengawas TK/SD, hal ini disebabkan asumsi guru yang berkurang dengan kondisi yang ada hanya 24 pengawas TK/SD dan kekurangan 98 pengawas TK/SD. Kebutuhan pengawas di tahun 2017 meningkat disebabkan oleh adanya 3 pengawas yang mengalami pensiun yakni 2 pengawas Kecamatan Minggir dan 1 pengawas Kecamatan Kalasan. Kecamatan Minggir di Tahun 2017 mengalami kekosongan pengawas TK/SD karena usia pensiun pengawas, sehingga kebutuhannya adalah 4 pengawas TK/SD.

Tahun 2018 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman kembali mengalami penurunan jadi 121 pengawas TK/SD dengan kondisi ketersediaan pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman kembali berkurang jadi 22 pengawas TK/SD dikarenakan Kecamatan Seyegan mengalami pensiun 1 pengawas TK/SD dan Kecamatan Tempel juga mengalami pensiun 1 pengawas TK/SD, Kecamatan Tempel pada tahun 2018 mengalami kekosongan pengawas TK/SD. Tahun 2018 Kabupaten Sleman mengalami kekurangan 99 pengawas TK/SD. Pada tahun 2019 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman kembali turun jadi 119 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 17 pengawas TK/SD dan kekurangan 102 pengawas TK/SD. Kecamatan Cangkringan pada tahun 2019 mengalami kekosongan pengawas TK/SD, jadi kebutuhan pengawas TK/SD Kecamatan Cangkringan pada tahun ini adalah 4 pengawas TK/SD. Tahun 2020 kebutuhan ideal pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman turun jadi 116 pengawas TK/SD dengan kondisi yang ada hanya 11 pengawas TK/SD dan kekurangan 105

pengawas TK/SD. Tahun 2020 ada tiga kecamatan yang mengalami kekosongan pengawas TK/SD yakni Kecamatan Mlati, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem.

Kondisi yang paling mendesak harus segera ditangani untuk pemenuhan formasi jabatan pengawas TK/SD adalah Kecamatan Minggir pada tahun 2017 sudah mengalami kekosongan pengawas TK/SD, Kecamatan Tempel tahun 2018 mengalami kekosongan pengawas TK/SD, Kecamatan Cangkringan tahun 2019 mengalami kekosongan pengawas TK/SD, tahun 2020 ada tiga kecamatan yang mengalami kekosongan pengawas TK/SD yakni Kecamatan Mlati, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem. Kecamatan di Kabupaten Sleman masih digolongkan jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan pengawas TK/SD sesuai dengan standar yang ada, seperti pada Kecamatan Depok yang menjadi populasi sekolah terpadat di Kabupaten Sleman dengan kebutuhan ideal 11 pengawas TK/SD akan tetapi kondisinya hanya ada 2 pengawas TK/SD. Tugas pokok dan fungsi seorang pengawas adalah melaksanakan fungsi pengawasn manajerial dan akademik di satuan pendidikan, untuk itu perlu diperhatikan mengenai ketersediaan jabatan pengawas dalam satu lingkup kecamatan agar dapat terjaga fungsi tersebut dan hasil dari proses pendidikan di satuan pendidikan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Kondisi rasio pengawas TK/SD yang tidak ideal mengakibatkan beban kerja dari pengawas menjadi *overload*, beban kerja yang berlebih menyebabkan kondisi yang tidak baik untuk pengawas berakibat stress pada pekerjaan. Seperti yang diungkapkan Anwar Prabu Mangkunegara (2008: 157) penyebab stress kerja, antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang terlalu rendah, iklim kerja yang tidak sehat. Stress kerja mengakibatkan menurunnya produktifitas pekerjaan, sehingga pekerjaan pengawas TK/SD yang berlebihan menjadi tidak terselesaikan dengan baik. Seperti yang diungkapkan Schuller (dalam Manurung, 2011: 19) beberapa dampak negatif yang ditimbulkan

oleh stress kerja karyawan adalah mengganggu kenormalan aktifitas kerja, menurunnya produktifitas kerja, dan terjadinya kekacauan berupa hambatan didalam manajerial maupun operasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kebutuhan pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Rasio pengawas TK/SD berdasarkan jumlah sekolah TK/SD di Kabupaten Sleman tahun 2010 adalah 1 : 20 sekolah dengan kondisi ideal 98 pengawas kurang 49 pengawas, rasio tahun 2011 adalah 1 : 21 sekolah dengan kondisi ideal 99 pengawas kurang 53 pengawas, rasio tahun 2012 adalah 1 : 22 sekolah dengan kondisi ideal 99 pengawas kurang 55 pengawas, rasio tahun 2013 adalah 1 : 24 sekolah dengan kondisi ideal 99 pengawas kurang 57 pengawas, rasio tahun 2014 adalah 1 : 26 sekolah dengan kondisi ideal 100 pengawas kurang 61 pengawas, dan rasio tahun 2015 adalah 1 : 32 sekolah dengan kondisi ideal 100 pengawas kurang 69 pengawas.
2. Rasio pengawas TK/SD berdasarkan jumlah guru TK/SD di Kabupaten Sleman tahun 2010 adalah 1 : 167 guru dengan kondisi ideal 137 pengawas kurang 88 pengawas, rasio tahun 2011 adalah 1 : 178 guru dengan kondisi ideal 136 pengawas kurang 90 pengawas, rasio tahun 2012 adalah 1 : 182 guru dengan kondisi ideal 133 pengawas kurang 89 pengawas, rasio tahun 2013 adalah 1 : 188 guru dengan kondisi ideal 132 pengawas kurang 90 pengawas, rasio tahun 2014 adalah 1 : 199 guru dengan kondisi ideal 129 pengawas kurang 90 pengawas, dan rasio tahun 2015 adalah 1 : 242 guru dengan kondisi ideal 125 pengawas kurang 94 pengawas.
3. Proyeksi kebutuhan pengawas TK/SD berdasarkan usia pensiun pengawas

menggunakan perbandingan proyeksi jumlah sekolah TK/SD di Kabupaten Sleman, yaitu kebutuhan ideal pengawas TK/SD tahun 2016 adalah 101 pengawas kurang 74 pengawas, tahun 2017 adalah 101 pengawas kurang 77 pengawas, tahun 2018 adalah 101 pengawas kurang 79 pengawas, tahun 2019 adalah 102 pengawas kurang 85 pengawas, dan tahun 2020 adalah 103 pengawas kurang 92 pengawas.

4. Proyeksi kebutuhan pengawas TK/SD berdasarkan usia pensiun pengawas menggunakan perbandingan proyeksi jumlah guru TK/SD di Kabupaten Sleman, yaitu kebutuhan ideal pengawas TK/SD tahun 2016 adalah 125 pengawas kurang 98 pengawas, tahun 2017 adalah 122 pengawas kurang 98 pengawas, tahun 2018 adalah 121 pengawas kurang 99 pengawas, tahun 2019 adalah 119 pengawas kurang 102 pengawas, dan tahun 2020 adalah 116 pengawas kurang 105 pengawas.

Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran berhubungan tentang analisis kebutuhan pengawas TK/SD di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman harus segera mengatur formasi untuk mengatasi kekosongan pengawas TK/SD yang akan terjadi pada tahun 2017 di Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel tahun 2018, Kecamatan Cangkringan tahun 2019, Kecamatan Mlati, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem tahun 2020.
2. Sebaiknya kebutuhan ideal akan pengawas TK/SD dapat terpenuhi agar proses pendidikan di Kabupaten Sleman dapat di monitoring dan di evaluasi dengan baik sebagaimana tugas dari adanya pengawas TK/SD. Lebih baik jika pemenuhan kebutuhan pengawas TK/SD didasarkan pada kebutuhan menurut jumlah guru TK/SD, karena jika pemenuhan kebutuhan didasarkan

pada jumlah sekolah TK/SD maka kebutuhan pengawas TK/SD berdasarkan jumlah guru TK/SD belum terpenuhi secara kondisi ideal menurut perbandingan pengawas TK/SD dengan guru TK/SD.

3. Apabila kebutuhan akan pengawas TK/SD tidak dapat dijangkau dengan proses rekrutmen, maka persoalan kekurangan pengawas bisa diatasi juga dengan cara mengoptimalkan peran dari KKG yang ada di setiap rayon. Sehingga tugas dari pengawas dapat terbantu.

DAFTAR PUSTAKA

Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nanang Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Piet A. Sahertian. (2000). *Konsep dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 28 Tentang Guru.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas.

Peraturan Menteri No 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

Pusat Statistik Pendidikan. (2007). *Teknik Proyeksi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.